



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 21 S.D. 25 FEBRUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI berfokus pada bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022, sesuai dengan hasil Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 12 Januari 2022, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Utara dan Aceh.

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 12 Januari 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Aceh.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah di Sulawesi Utara mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan memantau secara langsung terhadap kendala dan permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan dalam masa pandemi *Covid-19*.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dengan didampingi oleh mitra Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI dan Perpunas RI yaitu:

1. Drs. Mulyatsyah, M.M. selaku Direktur SMP Kemendikbudristek RI.
2. Ari Juliano Gema adalah Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf RI.
3. Hamka Hendra Noor, M.Si. selaku Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas, dan dr. Bayu Rahardian selaku Asdep Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI.
4. Dr. Upriyadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpunas RI.

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E. yang dihadiri Forkopimda Sulawesi Utara, serta pemangku kepentingan diantaranya:
 - a) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.
 - b) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
 - c) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 - d) Ketua LPMP, Ketua Dewan Pendidikan, dan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Utara.
 - e) Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi-Gorontalo:
 - 1) Rektor Universitas Sam Ratulangi
 - 2) Direktur Politeknik Negeri Manado
 - 3) Rektor Universitas Negeri Manado
 - 4) Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
 - f) Ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara.
 - g) Ketua PHRI dan ASITA Provinsi Sulawesi Utara.
 - h) Para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kunjungan ke sekolah dasar dan sekolah menengah:
 - a) SD Negeri Kolongan Jalan Walanda Maramis, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.
 - b) SMP dan SMA Advent Unklab Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara.
 - c) SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

II. TEMUAN DATA

Berikut data tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada pertemuan dengan Gubernur dan Jajaran Forkopimda Sulawesi Utara:

A. Rekrutmen Tenaga Guru ASN-PPPK

Tahun 2021 ada 321 Guru yang lolos seleksi di Tahun 2021, namun 1 Orang telah meninggal dunia sehingga jumlahnya menjadi 320 Orang. Ada beberapa formasi yang tidak ada pelamarnya karena memang tidak ada Guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi. Karena Guru Yayasan diberi kesempatan mengisi formasi di Sekolah Negeri, dampaknya adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat akan kekurangan guru.

B. Bidang Pendidikan Dasar Menengah

1. PIP yang sudah dialokasikan ke Satuan Pendidikan SD Tahun 2021 telah dicairkan dan diterima oleh para siswa yang namanya tercantum pada Daftar Penerima PIP Tahun 2022. (Ada yang dicairkan pihak sekolah dan ada diambil langsung oleh siswa penerima PIP).
2. BOS, penyalurannya tidak ada masalah. Semua masuk ke rekening sekolah, keterlambatan hanya masalah administrasi yaitu rekening tidak jelas, dan keterlambatan pelaporan secara online.
3. DAK. Mekanisme pelaksanaan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) mengajukan kebutuhan sarana prasarana (Fisik dan Peralatan) lewat aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan basis data Takola bagi SMK.
 - b. Kebutuhan Sekolah yang di input di Dapodik akan disortir/diverifikasi dengan aplikasi KRISNA.
 - c. Sekolah-Sekolah calon penerima DAK yang telah disortir/diverifikasi oleh aplikasi KRISNA akan diverifikasi kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan Sekolah calon penerima DAK melalui aplikasi KRISNA.
 - e. Hasil usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi diverifikasi kembali oleh Kemendikbudristek RI melalui aplikasi KRISNA.
 - f. Penetapan Sekolah penerima DAK melalui aplikasi KRISNA oleh Kemendikbudristek RI.
 - g. Berdasarkan URK (aplikasi KRISNA) Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan lelang pekerjaan lewat Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - h. Pencairan dana ke pihak penyedia dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai dana transfer dari KPP.

Tahun 2021 jumlah dana DAK yang teralokasi di SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Sulawesi Utara sejumlah Rp. 159.908.281.000,-, terdiri dari:

 - DAK SMA : Rp. 55.588.557.000,-
 - DAK SMK : Rp.102.873.764.000,-
 - DAK SLB : Rp. 1.445.960.000,-
4. Kurikulum, pada masa Pandemi (2020-2022) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberlakukan 3 (tiga) Kurikulum yang diberikan kewenangan pada Satuan Pendidikan untuk memilih yaitu: (1) Kurikulum 2013; (2) Kurikulum Darurat; dan (3) Kurikulum Penggerak yang dikhususkan bagi Sekolah Penggerak dan SMK-PK (Pusat Keunggulan).
5. PPDB. Sejak dilaksanakan PPDB online pertama 2017 s.d. sekarang (terakhir 2021), berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud,

Pergub dan Juknis yang dikeluarkan setiap tahun. Untuk acuan Tahun 2021 Jalur Pendaftaran dibagi menjadi:

SMA	SMK
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur zonasi 50% dari Kuota Penerimaan • Jalur Prestasi 30% dari Kuota Penerimaan • Jalur Afirmasi (Siswa kurang mampu) 15% dari Kuota Penerimaan • Jalur Perpindahan Orang Tua 5% dari Kuota Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Prestasi 75% dari Kuota Penerimaan • Jalur Afirmasi (Siswa kurang mampu) 15% dari Kuota Penerimaan • Jalur Zonasi 10% dari Kuota Penerimaan

Pelaksanaan PPDB menggunakan jalur online (daring) dan mandiri di era pandemi. Selama pelaksanaan sudah sesuai dengan acuan aturan yang berlaku dengan sistem zonasi menggunakan GPS kedudukan siswa dari rumah menggunakan NIK (KK) dan GPS lokasi Sekolah, dengan menggunakan sistem penerimaan yang terpadu dan terkoneksi dengan sistem Dapodik Kementerian, EMIS Kemenag dan NIK Dukcapil Kemendagri mengurangi kesalahan-kesalahan input, nama dan alamat karena berpatokan dengan KK dan NIK.

6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Bidang PKLK). Provinsi Sulawesi Utara memiliki 33 SLB yang terbagi di 11 kabupaten/kota dan masih terdapat 4 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Kab. Minahasa	0	4	4
2.	Kab. Minut	0	2	2
3.	Kab. Minsel	1	1	2
4.	Kab. Mitra	1	1	2
5.	Kota Manado	0	7	7
6.	Kota Bitung	0	6	6
7.	Kota Tomohon	0	3	3
8.	Kota Kotamobagu	1	0	1
9.	Kab. Kepl. Sangihe	1	1	2
10.	Kab. Bolmong	1	1	2
11.	Kab. Kepl. Talaud	1	1	2
12.	Kab. Bolsel			-
13.	Kab. Boltim			-
14.	Kab. Bolmut			-
15.	Kab. Kepl. Sitaro			-
Jumlah		6	27	33

Catatan: (Kabupaten Bolsel telah memiliki lahan untuk dibangun SLB Negeri Bolaang Uki). Dengan jumlah siswa 1629 Orang, jumlah guru 308 orang, dan jumlah tenaga kependidikan 49 orang.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021 telah menetapkan berbagai Panduan untuk Pendidikan Vokasi. Jumlah SMK-PK yang tersebar di beberapa

Kabupaten/Kota sebanyak 11 Sekolah yang terdiri dari:

Kabupaten/Kota	Sekolah
Kota Manado	SMK Negeri 1 Manado SMK Negeri 3 Manado
Kabupaten Minahasa Utara	SMK YADIKA
Kota Bitung	SMK Negeri 2 Bitung SMK Negeri 3 Bitung
Kabupaten Minahasa	SMK Pertanian Kalasey SMK Langowan
Kota Tomohon	SMK Kristen 1 Tomohon SMK Kristen 2 Tomohon SMK Santa Familia Tomohon
Kabupaten Minahasa Tenggara	SMK Negeri 1 Ratahan

8. Vaksin untuk Tendik dan Siswa
 SMA : Tendik 93%, Siswa 80%
 SMK : Tendik 89%, Siswa 74%

C. Kebijakan Merdeka Belajar

1. Kebijakan Merdeka Belajar menghadirkan Sekolah Penggerak dan SMK-PK yang diberikan kesempatan berinovasi dengan berbagai Projek Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpusat pada Anak/Murid diterapkan pada Sekolah Penggerak-SMK-PK. Siswa melaksanakan Profil Pelajar Pancasila sehingga menjadi tidak ada perundungan dan kekerasan. Sekolah Penggerak ada di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu: Bitung, Manado, Boltim.
2. Guru Penggerak adalah guru yang berada di Sekolah Penggerak, SMK-PK maupun Satuan Pendidikan yang bukan Sekolah Penggerak dan SMK-PK. Minat guru mendaftar sangat tinggi meskipun umur dibatasi 50 tahun, pendidikan 9 bulan secara daring. Guru Penggerak membuat satuan pendidikan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran.
3. Kurikulum Merdeka diluncurkan dalam rangka Pemulihan Ketertinggalan Pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi saat Pandemi Covid-19. Setuju dengan pembelakuan secara terbatas dan bertahap, sehingga Satuan Pendidikan siap dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan untuk mendaftar untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Tahun 2022-2023.

D. Bidang Kebudayaan

1. Payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan pemajuan kebudayaan di tingkat Provinsi yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum ada, sehingga pelaksanaan program kegiatan pemajuan kebudayaan masih belum maksimal dan belum menjangkau keseluruhan elemen kebudayaan daerah. Selain itu, PP tentang turunan dari Undang-Undang tentang Cagar Budaya baru lahir tanggal 1 Januari 2022.
2. Kegiatan rutin setiap tahun telah dilaksanakan, seperti: kegiatan pendataan objek yang diduga Cagar Budaya, Pendataan Objek pengusulan Warisan

Budaya Takbenda (WBTb), Koordinasi berkala ke kabupaten/kota perihal penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dukungan kegiatan Jalur Rempah serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan dimaksud. Pada tahun 2022 ini, bidang CBSTP akan mengadakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah untuk mendukung kegiatan Pusat yaitu Pekan Kebudayaan Nasional yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

3. Dinas Kebudayaan bersama PINKAN Indonesia dan Sulut telah selesai mengikuti hasil seleksi usulan WBTb Kolintang Indonesia ke ICH UNESCO dan sebagai laporan bahwa Kolintang lolos dalam seleksi dimaksud.
4. Keberadaan gedung pertunjukan (gedung kesenian) di tengah kota Manado layak dipertimbangkan dan diperjuangkan. Urgensi gedung kesenian yang memenuhi standar dan spesifikasi gedung pertunjukan dengan tata cahaya, *sound system*, panggung dan akustik bangunan yang representatif serta dikelola dengan baik sebagai aset provinsi.
5. Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional dan bahasa, kesenian dalam program kegiatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni, sudah berjalan walaupun belum maksimal. Hal ini karena ada keterbatasan anggaran dan kegiatannya terkonsentrasi pada 3 (tiga) jenis kesenian yaitu seni musik, seni tari dan seni rupa.
6. Pertimbangan untuk seni musik, seni tari dan seni rupa ini, disebabkan karena permintaan maupun fasilitasi kesenian yang mendominasi dalam berbagai *event*, festival, ataupun pameran masih seputaran 3 jenis kesenian dimaksud. Sementara untuk 2 (dua) jenis kesenian lainnya yaitu seni sastra dan seni teater belum terakomodir dalam program kegiatan dinas, meskipun sebenarnya cukup banyak sanggar teater dan penulis/penyair/sastrawan yang aktif menulis dan menghasilkan karya-karya yang layak dipentaskan.
7. Permasalahan yang krusial dalam kesenian yaitu meningkatkan sumber daya seniman lokal agar tidak kalah bersaing dengan seniman-seniman dari luar. Perlunya peningkatan kapasitas melalui *workshop* dan pelatihan seni, bengkel seni, maupun program pertukaran seniman untuk menambah wawasan dan membangun jaringan dengan pelaku seni di luar daerah/negeri. Perlu diciptakan banyak ruang kreatif bagi para seniman agar meningkatkan karya karya dan menumbuhkan apresiasi masyarakat luas.
8. Dalam penanganan cagar budaya, sejarah, nilai tradisi dan permuseuman adalah belum ditetapkannya para ahli pada bidang masing-masing seperti Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Ahli Sejarah yang tersertifikasi, dan ahli lainnya di bidang Kebudayaan dalam menunjang program dan kegiatan bidang kebudayaan di daerah. Selama ini proses pendokumentasian kebudayaan diperoleh dengan cara melakukan pendataan di kabupaten/kota setiap tahun. Untuk publikasi sudah mulai menggunakan media sosial seperti *Youtube*, *Facebook Page* dan *Instagram*. Namun pengelolaan *database* masih dalam proses dan masih memerlukan

perbaikan-perbaikan dan peningkatan layanan agar dapat diakses oleh publik.

9. Tantangan kesenian di era digital yaitu perpindahan minat masyarakat terutama generasi muda pada wahana digital seperti *Tiktok*, *Youtube*, *Instagram*, dll. mengakibatkan kesenian dan seniman tradisional kurang dilirik dan diminati. Harus ditemukan cara untuk mengoptimalkan keterlibatan seniman tradisi dalam persaingan era digital yang sangat cepat.

E. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Dukungan Pemerintah Daerah di tahun 2022 dalam pencapaian target Pemerintah, antara lain:
 - a. Mendorong dimulainya pembangunan KEK Pariwisata Likupang (area yang dikelola PT. MPRD). Peletakan Batu Pertama telah dilakukan oleh Menparekraf pada minggu kedua Februari 2022.
 - b. Pengembangan Wisata Bahari dengan pembangunan dermaga wisata di Pulau Bangka sesuai Integrated Masterplan (ITMP) Likupang-Manado yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI.
 - c. Pembangunan *Homestay* dan *Cottage* di Desa Wisata sekitar Daerah Super Prioritas (DSP) Likupang termasuk di Pulau Bangka.
 - d. Peningkatan aksesibilitas pariwisata melalui pembangunan *Manado Outer Ringroad 3* yang menghubungkan wilayah selatan ke Bandara Sam Ratulangi dan toll Manado-Bitung.
 - e. Pengembangan SDM melalui Pembangunan Poltekpar Manado di wilayah Kalasey 2, Minahasa.
 - f. Mendorong percepatan proses pembangunan 3 Hotel berbintang 4 dan 5 di Manado dan Likupang.
 - g. Meningkatkan atraksi di Sulawesi Utara melalui pelaksanaan *event-event* pariwisata berskala daerah, nasional maupun internasional selama Tahun 2022.
 - h. Melaksanakan pengembangan SDM melalui pelatihan daya tarik Desa Wisata, *hospitality*, pemasaran, UMKM ekonomi kreatif, bahasa asing dan kompetensi pemandu wisata dan sebagainya.
 - i. Melaksanakan pengembangan SDM Ekonomi Kreatif melalui pelatihan digitalisasi produk ekraf, *virtual tour*, *packaging* dan *matchmaking* produk dengan pihak hotel.
2. Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19:
 - a. Mengharuskan semua destinasi wisata di Sulawesi Utara menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada setiap destinasi wisata di kabupaten/kota termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
 - b. Memberikan pelayanan antigen gratis bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang tiba di Bandara Sam Ratulangi.
 - c. Melaksanakan vaksinasi bagi pelaku Parekraf.
 - d. Membuka akses penerbangan dari mancanegara via *Scoot Tiger Airlines*, dimana para wisman akan melaksanakan karantina di 28 Hotel yang telah bersertifikasi CHSE.
 - e. Melaksanakan Karantina Pulau bagi para Wisman di *resort* yang ada di Pulau Bangka.

- f. Memulai proses *bubble travel* dengan melibatkan *resort* yang berada di Pulau Bangka, Lembah dan Siladen.
 - g. Mempersiapkan pelaksanaan *Health Tourism* dalam rangka membuka peluang bagi para Wisnus dari Maluku, Papua, Gorontalo dan Sulawesi lainnya dapat berwisata dan berobat di fasilitas rumah sakit berstandar internasional, antara lain: RS Prof. Kandou, RS ODSK, RS Siloam, RS Sentra Medika, dan sebagainya.
 - h. Melaksanakan program *North Sulawesi Catalog* sebagai *matchmaking* antara pelaku UMKM Ekraf dengan perhotelan di Sulut agar produk lokal seperti Kopi, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain, dapat digunakan secara maksimal oleh pihak perhotelan di Sulut. Kegiatan ini juga dalam rangka program *onboarding* produk lokal, Produk Artisan dan Bangga Buatan Indonesia-Bangga Buatan Sulut.
3. Masukan dan usulan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan:
- a. Pasal (4) tentang tujuan pariwisata harus ditambahkan poin mempromosikan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*).
 - b. Pasal (5) huruf (e) perlu diperkuat kalimatnya menjadi memberdayakan dan mempromosikan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat.
 - c. Undang-Undang Kepariwisataaan juga perlu menyebutkan Ekonomi Kreatif sehingga nantinya memberikan amanat pembentukan Rancangan Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf).
 - d. Dengan penguatan aspek Kearifan Lokal memberikan ruang bagi perbaikan menu pembangunan DAK Fisik yang harus berciri khas daerah, mulai dari gapura, gazebo, *amphitheater* dan sebagainya.
 - e. Penguatan unsur pengembangan Desa/Kampung Wisata sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan perlu dipertegas sebagai domain Kemenparekraf termasuk dukungan anggaran.
 - f. Masukan lebih lanjut terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 akan disusulkan.

F. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Program kepemudaan minim kegiatan yang bermuara pada peningkatan kapasitas kepemimpinan baik pada organisasi kepemudaan juga kepramukaan serta pemberdayaan pemuda. Begitu juga dengan kewirausahaan muda, juga tidak ada pelatihan-pelatihan khusus dalam pengembangan kewirausahaan. Untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut, yang teranggarkan hanyalah kegiatan Paskibraka dan Hibah untuk Kepramukaan.
2. Usulan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara terkait penyusunan Desain Besar Pemuda yang tengah disusun oleh Kemenpora RI:
 - a. Desain Besar Pemuda harus dapat menampung aspirasi dari daerah, khususnya tentang peningkatan kapasitas kepemudaan, baik di bidang kepemimpinan pemuda, kepramukaan dan kewirausahaan. Pemuda harus mendapat perhatian lebih, bukan hanya bidang olahraga saja.
 - b. Meningkatkan memberdayakan pemuda menjadi mandiri dengan memberi peran serta, pelatihan dan kecakapan pemuda, serta meningkatkan Index Pembangunan Pemuda (IPP) melalui pelatihan berbasis mandiri.

3. Pandangan dan harapan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dan masyarakat terkait kebijakan Pemerintahan Pusat menerbitkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON):
 - a. Penetapan 14 cabang olahraga sesuai DBON, yaitu: Bulutangkis, Angkat Besi, Panjat Tebing, Panahan, Menembak, Wushu, Karate, Taekwondo, Balap Sepeda, Atletik, Renang, Dayung, Senam Artistik dan Pencak Silat, perlu ada kajian di tiap provinsi, karena tidak sesuai dengan cabang olahraga unggulan daerah yang dibina.
 - b. Pola Pembinaan atlet untuk menuju prestasi dunia dimulai dari usia junior, sehingga perlu pembinaan untuk semua cabang olahraga sesuai karakteristik masing-masing daerah.
 - c. Khusus Provinsi Sulut; cabang olahraga yang menghasilkan medali pada *multi event* seperti PON, tidak masuk dalam penetapan 14 cabang olahraga unggulan DBON (Tinjau).
 - d. Penetapan 14 cabang olahraga DBON lebih dikhususkan untuk atlet elit nasional lewat Pengurus Besar (PB) dan Pengprov masing-masing cabang olahraga.

G. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1. Evaluasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:
 - a. Bahwa urusan perpustakaan adalah urusan wajib non pelayanan dasar, maka perlu mendapat perhatian lebih serius.
 - b. Alokasi anggaran yang masih terlalu kecil baik dari APBD dan APBN (dana dekon) perlu ditingkatkan.
 - c. Sumber daya manusia (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) rata-rata sudah berumur diatas 50 tahun dan kebanyakan berijazah SLTA, bahkan sebagian besar pengelola (perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa) tidak memiliki tenaga pustakawan perlu merekrut tenaga kontrak/THL yang berlatar belakang S1 Ilmu Perpustakaan.
 - d. Koleksi perpustakaan yang dimiliki dari segi kualitas dan kuantitas masih sangat terbatas dikarenakan anggaran yang terbatas pula.
 - e. Koleksi digital telah disiapkan oleh perpustakaan provinsi melalui aplikasi e-Sulut yang bisa diunduh melalui *playstore* di android.
 - f. Gedung perpustakaan yang kurang representatif. Sarana dan prasarana termasuk jaringan internet yang belum memadai.
 - g. Tingkat kunjungan pemustaka yang menurun perlu usaha-usaha dan terobosan yang mampu menarik pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan.
 - h. Khusus koleksi perpustakaan, setiap tahun Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pengadaan koleksi buku walaupun porsinya masih sangat kecil.
 - i. Pengelolaan naskah kuno di Provinsi Sulawesi Utara untuk masih belum terlaksana sebagaimana mestinya karena ada keengganan masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkan ke perpustakaan dengan berbagai pertimbangan/alasan yang menganggap bahwa naskah kuno sebagai dokumen/warisan dari orang tua turun temurun.

- j. Perpustakaan khusus, baik di instansi atau di rumah ibadat dan sejenisnya, masih kurang mendapat perhatian karena hampir sebagian besar Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menyiapkan ruang khusus untuk perpustakaan.
 - k. Tenaga fungsional pustakawan di Provinsi Sulawesi masih sangat sedikit. Rata-rata di 15 (lima belas) kabupaten/kota belum ada tenaga fungsional pustakawan. Khusus di Dinas Perpustakaan Provinsi, jumlah tenaga fungsional pustakawan sekitar 20 Orang. Terdiri dari pustakawan yang diangkat melalui pengangkatan pertama karena mempunyai latar belakang pendidikan S1 perpustakaan, melalui diklat calon pustakawan tingkat ahli, melalui jalur inpassing (sebagian besar berijazah SLTA) dan terakhir melalui penyetaraan jabatan. Fungsional pustakawan di perguruan tinggi (negeri maupun swasta) sangat kurang, bahkan ada yang tidak memiliki tenaga fungsional pustakawan.
 - l. Sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan masih sangat terbatas, baik itu tenaga pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, sumber daya koleksi, sarana prasarana dan gedung. Bahkan sebagian besar Dinas Perpustakaan di Kabupaten/Kota belum memiliki gedung sendiri dan masih menyewa gedung/menempati ruangan dikantor Bupati/Walikota. Pada Tahun 2022 ini dinas perpustakaan Provinsi dan beberapa Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota mendapat alokasi dana (DAK) untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan.
 - m. Pemustaka yang datang ke perpustakaan terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, Peneliti, Penulis, Guru/Dosen dan ASN serta masyarakat umum. Namun dalam 2 tahun terakhir ini tingkat kunjungan ke perpustakaan sangat menurun drastis karena situasi pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan jumlah pemustaka maka melalui pimpinan (kepala dinas) telah melakukan berbagai terobosan, diantaranya:
 - Penandatanganan MoU dengan Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Kerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - Pelibatan Duta Baca Sulut;
 - Kerjasama dengan Asosiasi Perpustakaan Sekolah;
 - Kerjasama dengan para Penulis/Pengarang;
 - Kerjasama dengan penerbit;
 - Penguohan Bunda Literasi Sulut (Maret 2022);
 - Book Fair & Exhibition 2022 (Maret 2022);
 - Program pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 - n. Oengelolaan koleksi deposit di Provinsi Sulawesi Utara hanya ada di Dinas Perpustakaan Provinsi. Koleksi deposit diperoleh melalui program dan kegiatan hunting koleksi deposit daerah ke kabupaten/kota, penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah (BID/KID) dengan pembiayaan melalui APBD yang dianggarkan setiap tahun.
2. Perkembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sulawesi Utara.
 - a. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Sulawesi Utara dimulai pada tahun 2020 untuk 3 kabupaten yaitu:

Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Kepulauan SITARO.

- b. Tahun 2021 dari 3 kabupaten diperluas ke 8 Perpustakaan Desa yaitu:
 - 1) Desa Watumea (Kab. Minahasa)
 - 2) Desa Kanonang Dua (Kab. Minahasa)
 - 3) Desa Leilem (Kab. Minahasa)
 - 4) Desa Soguo (Kab. Bolsel)
 - 5) Desa Salongo (Kab. Bolsel)
 - 6) Desa Popodu (Kab. Bolsel)
 - 7) Desa Talawid (Kab. Kepulauan SITARO)
 - 8) Desa Haasi (Kab. Kepulauan SITARO)
- c. Tahun 2022 ketambahan 2 kabupaten dan 2 kota, serta 3 desa yaitu:
 - 1) Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 2) Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - 3) Kota Kotamobagu
 - 4) Kota Bitung
 - 5) Desa Koha (Kabupaten Minahasa)
 - 6) Desa Kembuan (Kabupaten Minahasa)
 - 7) Desa Touliang Oki (Kabupaten Minahasa)
- d. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Layanan Informasi:
 - Kabupaten Minahasa telah meningkatkan kapasitas internet 40 Mbps.
 - Kabupaten Kepulauan SITARO 20 Mbps.
 - Desa Watumea melakukan penambahan buku sebanyak 190 exemplar dan 10 rak buku.
 - Desa Kanonang Dua 60 exemplar.
 - Kabupaten Kepulauan SITARO Penataan Ruang dan Penataan Taman Baca serta Penataan Gazebo.
 - 2) Kegiatan Pelibatan Masyarakat:
 - Desa Soguo (Kab. Bolsel) melakukan pelatihan komputer bagi Siswa SMP dan SD.
 - Desa Watumea (Kab. Minahasa) melakukan Penyuluhan Kesehatan Lansia, serta melakukan pengembangan minat bakat anak muda dengan membelajarkan budi daya ikan air tawar.
 - Desa Talawid (Kab. Kepulauan SITARO) melakukan pelatihan manisan Pala dan pelatihan membuat kerajinan dari kerang.
 - 3) Kegiatan Advokasi dan Publikasi:
 - Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan SITARO telah melakukan Advokasi ke Dinas Kominfo terkait jaringan internet, kemudian Advokasi ke Kepala Desa penambahan buku, juga Advokasi ke beberapa toko buku untuk penambahan buku.

III. KUNJUNGAN LAPANGAN

1. SD Negeri Kolongan Jalan Walanda Maramis, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana data dapodik, terdiri dari 14 orang guru, 150 siswa laki-laki dan 133 siswa perempuan. Terdapat 12 Rombongan Belajar dengan Kurikulum SD 2013. Sarpras yang dimiliki antara lain 16 ruang kelas, tidak memiliki laboratorium, 1 ruang perpustakaan, dan 2 sanitasi siswa.

Permasalahan yang ada di SD Negeri Kolongan, antara lain masih ada guru honorer yang mengabdikan puluhan tahun namun tidak terangkat dalam program 1 Juta Guru ASN.

2. SMP dan SMA Advent Unklab Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berada dibawah Yayasan Universitas Klabat dan memiliki visi Berkarakter seperti Yesus Kristus, Berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri.

Pada pertemuan dengan guru dan tenaga pendidikan di SMP dan SMA Advent Unklab, beberapa usulan yang disampaikan antara lain bantuan untuk laboratorium beserta kelengkapan sarana praktikum IPA yang dapat mendukung proses belajar-mengajar.

3. SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, diresmikan pada 20 Desember 2021. Sekolah ini hadir sebagai pengganti sekolah lama yang terkena dampak perluasan jalan tol. Luas Sekolah sekitar 16.814 m² dengan bangunan yang terdiri dari Ruang Kelas (3.024 m²), Kantor (522 m²), UKS (200 m²), Laboratorium dan Perpustakaan Guru (1.616 m²), GOR (1.260 m²), Lapangan Indoor (328 m²), Lapangan Outdoor (2020,2 m²), dan Kantin (200 m²), dengan total yang terbangun yaitu 9.170,2 m².

Beberapa permasalahan yang muncul pada diskusi dengan para kepala sekolah di daerah 3T di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketiadaan tunjangan guru untuk daerah terpencil semenjak adanya pandemi Covid-19, sehingga disulkan kembali adanya tunjangan guru untuk daerah 3T.
- b. Keterbatasan pendidikan di wilayah kepulauan antara lain transportasi (menggunakan kapal) maupun ketiadaan listrik (menggunakan genset), dan lain-lain, sehingga diperlukan bantuan bagi guru untuk transportasi dan genset.
- c. Untuk memenuhi jumlah tenaga pengajar, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan jasa Guru THL (Tenaga Harian Lepas) disamping guru honorer. Disulkan agar para guru tenaga honorer maupun THL diangkat menjadi ASN sehingga status dan kesejahteraannya lebih terjamin.
- d. SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat meskipun telah memiliki ruang laboratorium baru, namun sarana laboratoriumnya belum ada.

IV. KESIMPULAN

1. Terkait rekrutmen Tenaga Guru menjadi ASN-PPPK, pada tahun 2021 ada 321 Guru yang lolos seleksi meskipun ada beberapa formasi yang tidak ada pelamarnya, karena tidak ada guru yang berkualifikasi pendidikan sesuai formasi. Ada kekhawatiran akan adanya kekurangan guru yayasan, karena diberikan kesempatan mengisi formasi guru di sekolah negeri. Selain itu, banyak guru THL (Tenaga Harian Lepas) yang membutuhkan kepastian status dan kesejahteraan.
2. Evaluasi terhadap program dan kegiatan kementerian, seperti PIP, BOS, DAK, kurikulum, PPDB, pendidikan khusus dan layanan khusus,

penyelenggaraan pendidikan vokasi serta Pembelajaran Jarak Jauh/Belajar Dari Rumah, pemberian vaksin bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa:

- a) Perlunya penambahan kuota PIP.
 - b) Perlunya verifikasi lebih awal terhadap sekolah penerima DAK dan BOS.
 - c) Pemberian vaksin bagi kepentingan pendidikan perlu terus dilakukan untuk persiapan tatap muka terbatas di tahun ajaran baru.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bidang kebudayaan berkonsentrasi pada 3 (tiga) jenis kesenian yaitu seni musik, seni tari dan seni rupa dengan pertimbangan karena permintaan maupun fasilitas kesenian yang mendominasi dalam berbagai *event*, festival, ataupun pameran masih seputaran 3 jenis kesenian dimaksud. Seni sastra dan seni teater belum terakomodir dalam program kegiatan dinas, meskipun sebenarnya cukup banyak sanggar teater dan sastrawan yang aktif menulis dan menghasilkan karya-karya yang layak dipentaskan. Permasalahan yang krusial dalam kesenian yaitu meningkatkan sumber daya seniman lokal agar tidak kalah bersaing dengan seniman-seniman dari luar.
 4. Di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan beberapa kegiatan parekrif selama pandemi *Covid-19*. Untuk mendukung peningkatan sumberdaya manusia prekrif, pada tahun ini akan dimulai pembangunan Politeknik Pariwisata Manado di Desa Kalasey Dua Kabupaten Minahasa.
 5. Kepemudaan di Sulawesi Utara, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yang teranggarkan hanyalah kegiatan Paskibraka dan Hibah untuk Kepramukaan. Kegiatan kepemudaan yang bersifat kepemimpinan dan kewirausahaan sangat minim. Sedangkan permasalahan bidang keolahragaan antara lain pembinaan olahraga belum merata dan terarah, masih lemahnya peran lembaga yang menangani olahraga prestasi, terbatasnya sarana dan prasarana dan sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.
 6. Permasalahan di bidang perpustakaan antara lain sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan masih sangat terbatas, baik itu tenaga pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, sumber daya koleksi, sarana prasarana dan gedung. Bahkan sebagian besar Dinas Perpustakaan di kabupaten/kota belum memiliki gedung sendiri dan masih menyewa gedung/menempati ruangan dikantor Bupati/Walikota. Selain itu, masalah yang sering muncul terhadap layanan perpustakaan terutama di masa Pandemi *Covid-19* adalah kurangnya pemustaka atau pengunjung.

V. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Utara antara lain terkait:
 - a. perbaikan pengelolaan DAK, PIP, BOS dan PPDB di Sulawesi Utara melalui perbaikan regulasi, petunjuk teknis, manajemen dan pelaksanaannya.

- b. memperkuat efektifitas PJJ/BDR di Sulawesi Utara, baik melalui daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) dengan memperbaiki kendala minimnya sarana-prasarana penunjang.
 - c. memperhatikan pelaksanaan pengangkatan GTK Honorer atau THL (Tenaga Harian Lepas) menjadi ASN se-Provinsi Sulawesi Utara, agar sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di seluruh provinsi.
 - d. memenuhi kembali tunjangan guru di daerah 3T dan daerah kepulauan yang selama Covid-19 telah dihapus, serta memenuhi fasilitas belajar-mengajarnya seperti kelengkapan sarpras laboratorium.
2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat dukungan bagi upaya pemenuhan sumberdaya manusia pariwisata melalui pembangunan Poltekpar Manado.
 3. Komisi X DPR RI mendesak kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dengan memperkuat kegiatan dan melengkapi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
 4. Komisi X DPR RI, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memenuhi sumber daya perpustakaan seperti tenaga pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, sumber daya koleksi, serta memperbaiki sarana prasarana perpustakaan di daerah.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Utara, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 25 Februari 2022

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-
2022 Komisi X DPR RI**

TTD.

Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.
A.185